

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A., & Nurhadi, A. (2022). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEGAHAN POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN BATUAN DI SUNGAI GENDOL (STUDI KASUS GERAKAN SOSIAL PAGUYUBAN SINDU TOLAK ASAT). *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 154-164.
- Anggariani, D., Sahar, S., & Sayful, M. (2020). Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai. *SIGn Journal of Social Science*, 1(1), 15-29.
- Artikel laman ombudsman (2023). Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti>. Diakses pada 9 Juni 2024.
- As'ad, M. U. (2016). Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang dalam Pilkada di Kalimantan Selatan). *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1).
- Baron, R.A. & Byrne, D. (2004). psikologi Sosial Edisi Kesepuluh: Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Eriyanto. 2014. *Analisis Jaringan Komunikasi: Strategi Baru dalam Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Erlyani, N. (2013). Prasangka sosial warga di kawasan pertambangan. *Jurnal Ecopsy*, 1(1), 33-37.
- Greenpeace Indonesia. (2020> Memperkuat Tata Kelola laut dan perikanan Indonesia untuk Keberlanjutan. Diakses pada 20 Februari 2024 Pukul 11.08. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4717/memperkuat-tata-kelola-laut-dan-perikanan-indonesia-untuk-keberlanjutan/>
- Hidayat, F. I. (2020). Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir. *Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin*.
- Huijboom, N. 1010. "Joined up ICT innovation in Government." Disertasi. Rotterdam: Erasmus University.
- KURNIAWAN, B. (2023). *Gerakan Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas Tahun 2018-2023 (Studi Gerakan Perlawanan Masyarakat terhadap Perampasan Lahan)* (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO).

- Muthhar, M. A. A. (2016). Membaca demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia. *Ushuluna*, 2(2), 338519.
- Nova, Dede dan Zaky Mubarak. 2020. Konflik Sosial dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser. *Piktorial Journal of Humanities*. Vol. 2 No. 2. p. 104-114. (<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/PTL/article/view/7637/4954>).
- NURROHMAH, D. F. (2024). *Gerakan Sosial Gempadewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam): Studi Kasus Perlawanan Masyarakat terhadap Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
- Pernyataan bupati demak
<https://youtu.be/mMJEf5Fcq34?si=NOOT0GxiAuIaGPY->
- Saputra Eka Yogi. (2023). Permen Sedimentasi Laut Rampung, Walhi: Bukti Bluewashing Pemerintah. <https://www.mongabay.co.id/2023/10/30/permen-sedimentasi-laut-rampung-walhi-bukti-bluewashing-pemerintah/>. Diakses pada 6 Juni 2024 Pukul 20.12
- sardi, irwan. (2018). RELASI KUASA DAN MODAL: STUDI PERLOAWANAN MASYARAKAT DESA NANGKA TERHADAP PEMBUKAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. GEMILANG CAHAYA MENTARI. *Jurnal Analisa Sosiologi*; Vol 6, No 2 (2017); 10.20961/Jas.V6i2. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18082>
- ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, & Ratna Endang W. (2014). KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA WOGALIH, KECAMATAN YOSOWILANGUN, KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2010-2011 (THE CONFLICT OF IRON SAND MINING IN WOGALIH VILLAGE, YOSOWILANGUN SUBDISTRICT, LUMAJANG REGENCY 2010-2011). <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57151>

- Sutton, R. 1999. "The Policy Process: An Overview." Working Paper No. 118. London: Overseas Development Institute.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Utami Dwi Kristi. (2023). Khawatir Wilayah Kian Tenggelam, Warga Tolak Pengerukan Pasir Laut di Demak. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/03/khawatir-wilayah-kian-tenggelam-warga-tolak-pengerukan-pasir-laut-di-demak>. Diakses pada 9 Juni 2024.